

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Edisi Kedua. Kencana, Jakarta.
- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Edisi 1. Cetakan keempat. Sinar Grafika, Jsakarta.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. *Hukum Perikatan* Cetakan kedelapan. PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2018. *Hukum Perjanjian*. Cetakan kedua. UPT Unhas Press, Makassar.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak dan perancangan Kontrak*. Cetakan keenam. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2013. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*. Kencana, Jakarta.
- Bambang Sugeng A.S. 2011. *Hukum Acara Perdata*. Kencana, Jakarta
- Boedi Harsono.2003. *Sejarah Pembentukan Undang-Undang pokok Agraria isi dan Pelaksanaan*. Djambatan, Jakarta.
- Charlie Rudyar. *Kamus Hukum Edisi Lengkap*. Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Effendi Peranginangin. 2007. *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Rajawali Press, Jakarta.
- Habib Adjie. 2009. *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*. PT Citra Aditya Bakti,Bandung.
- Habib Adjie. 2012. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Habib Adjie. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai pejabat publik*. Bandung, Refika Aditama, 2013.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. *Memahami. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kencana, Jakarta.
- Hans Kelsen. 2006. sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien. *Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung.
- Herlien Budiono. 2014. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono. 2012. *Kumpulan Perdata dibidang Kenotariatan*. Citra Bakti, Bandung.
- Herlien Budiono. 2016. *Kumpulan Perdata dibidang Kenotariatan*. Citra Bakti, Bandung.
- H.Salim.2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- H. Salim, HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. RajaGrafindo, Jakarta.
- Irma Devita Purnamasari. 2010. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, Mudah dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan*, Bandung. PT Mizan Pustaka.
- H.R Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indrajaya, Yogastio Esa Dimmarca, Prastyo Teguh Pamungkas. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*.PT. Refika Aditama, Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Mirra buana media, Yogyakarta.
- Marilang. 2013. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Alauddin University Press, Makassar.
- M.Lutfhan Hadi Darus. 2016. *Hukum Notariat dan tanggung jawab notaris*. UII Press Yogyakarta, yogyakarta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Pranada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- R.Subekti. 1995. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan XXVII. PT Intermedia, Jakarta.
- R. Subekti dan R.Tjitrosudibio. 1980. *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita. Jakarta.
- Salim (1). 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Mandar Maju, Bandung.
- Soedharyo Soimin. 2004. *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Renika Cipta, Jakarta
- Sugeng Istanto. 2014. *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. cetakan ke 3. Prenade media, Jakarta.
- Suharjono. 1995. *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Desember. Jakarta.
- Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Tim penyusun Pedoman Penulisan Tesis, Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Kenotariatan dan Program Studi Magister Ilmu Hukum. 2015. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Urip Santoso. 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang dan Sifat Akta*. Prenamedia Group, Jakarta.

Y.Sogar Simamora. 2017. *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2017

II. Peraturan Perundangan Undangan

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/ Pdt.G / 2018 /PN Bpp.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 Tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta tanah

III. Jurnal dan Tesis

Aprilliani Putri Suhardini, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Akta, UNISULA, 2018, Volume 5, Nomor 2.

Arie S. Hutagalung dan Suparjo Sujadi. *Pembeli Beriktikad Baik dalam Konteks Jual Beli Menurut Ketentuan Hukum Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, Universitas Indonesia. 2005. Nomor 1.

Bachtiar dan Tono Sumarna, *Pembebanan Tanggungjawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas*, Jurnal Yudisial, 2018, Volume 11, Nomor 2.

Endang Purna Noor Aditama, *Tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli*, Jurnal Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, 2018, Volume 13, Nomor 1.

Fredrik Mayore Saranaung, *Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997*, Jurnal Lex crimen, 2017, Volume VI, Nomor 1.

Hersa Krisna Muslim. *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah (Schijn*

Handeling) Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G./2009.PN.BTL, Tesis, Universitas Gajah Mada, 2019.

Kadek Cahaya SusilaWibawa, Menakar Kewenangan dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) dalam Persfektif Bestuurs Bevoegdheid, Jurnal Crepido, 2019, Volume. 01, Nomor 01.

Lusiana Iskandar Wijaya, Arsin Lukman dan Suparjo Sujadi, Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kaitannya Dengan Pembuatan Akta Jual Beli Yang Memfasilitasi Jual Beli Tanah Melanggar Hukum (Analisis Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Pdt/2017), Indonesian Notary.

Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstitusi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Universitas Diponegoro, 2019, Volume 01, Nomor 01.

Perpetua Graciana Kanta, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli “Pura-Pura” Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 159/PDT.G/2018/PN. BPP, Jurnal Indonesian Notary, Universitas Indonesia, 2020, Volume 2, Nomor 3.

IV.Website

Ahmadi Miru, “*mencermati keabsahan perjanjian*” yang disampaikan pada seminar departemen hukum keperdataan fakultas hukum unhas.Pada 4 November 2021.Dapat diakses https://youtu.be/n2zdz9bym_E

Sanusi, *Pengertian Perjanjian dan Unsur Perjanjian, Tabir Hukum*, <http://tabirhukum.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-perjanjian-dan-unsur.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2021

V. Wawancara

Wawancara Abdul Muis. S.H., M.H. selaku PPAT di kota Makassar dan juga merupakan ketua pengurus wilayah (Pengwil) Ikatan Notaris Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 2 Februari 2022.

Wawancara Ahmad Tauzan Siata PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 17 November 2021.

Wawancara Andi Sengngeng Pulaweng salahuddin, S.H.,M.Kn. selaku PPAT/ Notaris di Kota Makassar dan juga merupakan ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 23 Februari 2022

Wawancara Birlian Thoris PPAT/ Notaris di Kota Makassar dan sekaligus merupakan Majelis Kehormatan Wilayah Sulawesi Selatan (MKW IPPAT) pada tanggal 11 Februari 2022.

Wawancara Endang Soelianti PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 03 Februari 2022.

Wawancara Indriani Lagoan PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 17 November 2021

Wawancara Lola Rosiana PPAT/ Notaris di Kota Makassar dan sekaligus merupakan Majelis Kehormatan Wilayah Sulawesi Selatan (MKW IPPAT) pada tanggal 11 Maret 2022.

Wawancara Muhammad Asyik Noor Notaris/PPAT Kota Makassar pada tanggal 22 Februari 2022.

Wawancara Niny Savitry PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 05 Juli 2021.

Wawancara Purnamawati PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 06 Juni 2021

Wawancara Ria Trisnomurti PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 06 Juli 2021.

Wawancara Ridwan Nawing PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 05 Juli 2021.

Wawancara Tati Selastiwati PPAT/Notaris di Kota Makassar dan juga merupakan sekertaris Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 13 Januari 2022

Wawancara Taufik Arifin selaku PPAT/ Notaris di Kota Makassar dan juga merupakan ketua Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada tanggal 2 Februari 2022.

Wawancara Wahyu Indriawati PPAT/ Notaris di Kota Makassar pada tanggal 23 Februari 2022